

**KINERJA KEPALA DESA DALAM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN
DI DESA TEMPOK KECAMATAN TOMPASO KABUPATEN MINAHASA**

SILVIA SINGAL; GUSTAAF B. TAMPI; NOVVA N. PLANGITEN
Program Studi Ilmu Administrasi Negara, FISPOL Unsrat
email : singalsilvia@gmail.com

Abstract : This study uses the title of the village head in the implementation of development in the village of Tempok, Tompaso District. The focus of this study uses the theory of performance according to Gomes (2003: 134) suggests four indicators in measuring performance. This study used a qualitative method, informants of this study were 10 people taken from the Village Head, Village Secretary, Village Head, Head of Development, Chair of the Village Consultative Body, community members. Data collection uses interview, collection and arrangement techniques. the data analysis technique used in this qualitative research method is inductive proposed by Sugiyono. The results of this study are seen from 4 indicators, namely: (1) the work of the village head has been very good can be seen from the success of several implementation of development in accordance with community needs. (2) the quality of work in the implementation of development is quite good, it can be seen from the village head, as well as the liberation and direction of the village consultative body (BPD) and village officials. (3) the work knowledge of the village head is good in the eyes of the community because the village head is able to realize the development policies in accordance with what is needed by the community. (4) the cooperation of the village head is very good in the implementation of tasks can be seen from each process of carrying out the work, the village head always tries to move the community to work together to carry out the process of implementation of village development.

Keywords : Village, Head Performance, Development.

PENDAHULUAN

Pemerintah Desa atau disebut Pemdes adalah lembaga pemerintah yang bertugas mengelola wilayah tingkat Desa Pemerintah Desa Sebagai Ujung Tombak dalam system pemerintah daerah akan berhubungan dan bersentuhan langsung dengan masyarakat. Karena itu system dan mekanisme penyelenggaraan pemerintah daerah sangat didukung oleh pemerintah desa sebagai bagian dari pemerintah daerah. Struktur kelembagaan dan mekanisme kerja ini sesuai tingkatan pemerintah, Pemerintah desa adalah penyelenggaraan urusan oleh pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat.

Pemerintah desa terdiri atas pemerintah desa (yang meliputi kepala desa dan perangkat desa) dan badan permusyawaratan desa (BPD) badan permusyawaratan desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintah desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah desa. Kepala desa yang merupakan pimpinan desa harus menjalankan fungsi dan perannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga setiap program yang diatur oleh kepala desa dapat berjalan dengan baik, maka sebagai seorang pimpinan harus berperan aktif dalam memberdayakan masyarakat desa.

Kepala desa juga mengajukan rancangan peraturan desanya sendiri yang sesuai dengan UU, membina kehidupan perekonomian masyarakat desa hingga mengordinasikan segala elemen yang ada dalam melakukan pembangunan desa secara partisipatif untuk kemajuan dan kepentingan desa. Pembangunan merupakan suatu upaya yang dilakukan pemerintah saat ini guna menunjang proses perubahan sosial ke arah yang lebih baik disegala bidang baik itu dibidang politik, ekonomi, sosial budaya, dan lainnya. Untuk menunjang proses pembangunan tersebut diperlukan adanya kerja sama dari masyarakat agar apa yang telah direncanakan dapat berjalan sesuai dengan apa yang telah diharapkan.

Berdasarkan Undang - Undang No. 6 Tahun 2014, pasal 1 ayat 1 disebutkan bahwa: Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Penilaian kinerja pemerintah Desa Tempok Kecamatan Tompaso oleh masyarakat sampai saat ini boleh dikatakan belum sepenuhnya berhasil, itu dikarenakan dalam periode jabatan kepala desa, ada pembangunan yang sampai saat ini pelaksanaannya belum selesai, seperti pembangunann akses jalan yang

menghubungkan sumber produksi petani dan juga sekaligus jalan alternatif yang menghubungkan desa Tempok dengan Desa Liba Kecamatan Tompaso.

Sesuai dengan situasi dan kondisi yang disebutkan diatas, dituntut keseriusan kepala desa untuk lebih meningkatkan kinerjanya dalam pelaksanaan pembangunan desa. Kinerja kepala desa yang dimaksud adalah keseriusan dan tanggung jawab dalam memberikan pelayanan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Salah satu pembangunan yang dibuat oleh kepala desa Tempok belum berjalan sebagaimana mestinya, hal ini diduga kurangnya pengawasan dan peran kepala desa dalam menggerakkan partisipasi masyarakat dalam proses berlangsungnya pelaksanaan pembangunan desa. Hal ini sebagai cerminan dari kinerja dari kepala desa itu sendiri dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya.

Istilah kinerja berasal dari kata *Job Performance* atau *Actual Performance* (prestasi kerja atau prestasi yang sesungguhnya dicapai oleh seseorang). Kinerja merupakan tingkat pencapaian atau suatu prestasi yang bisa diraih oleh pegawai berdasarkan indikator-indikator kinerja yang telah ditemukan. Mengukur keberhasilan kinerja, baik kinerja pegawai atau kinerja sebuah organisasi sangatlah diperlukan hal ini bertujuan untuk mengetahui tingkat keberhasilan yang diraih. Menurut Eko Maulana, (2012) kinerja mempunyai makna yang luas, bukan hanya menyatakan sebagai hasil kerja, tetapi juga bagaimana proses kerja berlangsung. Menurut Simanjuntak (2005) yang mengemukakan kinerja adalah tingkat pencapaian hasil pelaksanaan tugas tertentu. Menurut Mangkunegara (2002;22) kinerja adalah hasil baik secara kualitas maupun kuantitas yang dicapai oleh seseorang dan melaksanakan tugas sesuai tanggung jawab yang diberikan. Widodo (2006;78) mengemukakan bahwa kinerja adalah melakukan suatu kegiatan yang menyempurnakan sesuatu dengan tanggungjawabnya dengan hasil seperti yang diharapkan. Winardi (2001;22) mengemukakan bahwa kinerja adalah tingkat pencapaian hasil atas pelaksanaan tugas tertentu. Sehingga telah diketahui bagaimana tingkat kinerja yang telah dicapai bisa dilakukan evaluasi. Secara umum, definisi kinerja adalah penampilan hasil kerja personal baik kualitas maupun kuantitas yang dapat dicapai oleh

seorang pegawai sesuai dengan tanggung jawab yang dibebankan atau diberikan kepadanya. Ada beberapa indikator pengukuran kinerja menurut Gomes (2003;134) adalah sebagai berikut :

1. Kuantitas kerja (*Quantity of work*) : jumlah kerja yang dilakukan dalam suatu periode waktu yang ditentukan.
2. Kualitas pekerjaan (*Quality of work*) : kualitas kerja yang dapat dicapai berdasarkan syarat-syarat kesesuaian dan kesiapannya.
3. Pengetahuan kerja (*Job knowledge*) : luasnya pengetahuan mengenai pekerjaan dan keterampilannya.
4. Kerja Sama (*Cooperation*) : kesediaan untuk bekerja sama dengan orang lain (sesama anggota organisasi).

Dengan memahami konsep kinerja diatas, maka diharapkan kepala desa dapat berkinerja baik dalam penyelenggaraan pembangunan di desa. Sebab jika menelaah konsep pembangunan sebagaimana pasal 78 ayat 1 dan 2 UU No.4 Tahun 2014 dikatakan pembangunan desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penggulungan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Menurut Suparno (2001:46) mengatakan Pembangunan desa dilakukan dalam rangka imbang yang sewajarnya antara pemerintahan dengan masyarakat. Sehingga kinerja yang baik dari kepala desa dapat menjadikan berjalannya pembangunan yang ada di desa dan untuk kesejahteraan masyarakat.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Adapun yang menjadi fokus penelitian yaitu kinerja kepala desa dalam pelaksanaan pembangunan desa dengan menggunakan teori dari Gomes (2003:134) yang mengemukakan empat indikator yaitu *Quantity Of Work* (kuantitas kerja), *Quality Of work* (Kualitas Pekerjaan), *Job Knowledge* (Pengetahuan Kerja), *Cooperation* (Kerja sama). Informan yang digunakan dalam penelitian Kepala desa, Sekretaris

desa, Kepala jaga, Kaur pembangunan, Ketua BPD, Masyarakat. Teknik pengumpulan data menggunakan metode Wawancara, Observasi, Dokumentasi. Sumber data yang dipakai Data Primer dan Data Sekunder. Teknik analisis data dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik penelitian kualitatif dan data tersebut dipadukan dan dianalisis secara kualitatif dengan memberikan gambaran-gambaran, interpretasi, atau penafsiran fakta-fakta yang ada.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Desa Tempok adalah sebuah desa di wilayah kecamatan Tompaso, luas wilayah desa tempok yang cukup luas 250 ha yang berbatasan dengan 10 desa dan 5 Kecamatan. Jumlah penduduk yang ada di desa Tempok adalah berjumlah 721 Jiwa dan terbagi dalam 2 Jaga dengan jumlah 250 KK. Masyarakat desa Tempok Hanya memeluk Agama Kristen Protestan dan Kristen Katolik. Sebagaimana yang dikemukakan dalam metodologi penelitian fokus penelitian bagaimana untuk mengetahui kinerja kepala desa dalam pelaksanaan pembangunan desa di lihat dari empat indikator :

1. *Quantity of work* (kuantitas kerja), menurut hasil observasi dan wawancara soal kuantitas kerja kepala desa dalam pelaksanaan pembangunan dilihat dari jumlah kerja yang dihasilkan dan ketetapan waktu dalam pelaksanaan pembangunan. Menurut beberapa informan dalam hasil wawancara kuantitas kerja kepala desa sudah sangat baik dapat dilihat dari suksesnya beberapa pelaksanaan pembangunan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dan selaku pimpinan di Desa, kepala desa telah menjalankan kinerjanya sebagai motivator penggerak kepada masyarakat dengan baik.
2. *Quality of work* (kualitas Pekerjaan), Dalam pelaksanaan pembangunan kualitas pekerjaan kepala desa dalam pelaksanaan pembangunan cukup baik, dapat dilihat dari kepala desa selalu berupaya memberikan pembinaan serta arahan terhadap badan permusyawaratan desa (BPD) dan aparat desa dalam rangka bersama-sama saling memberikan motivasi terhadap partisipasi masyarakat pada pembangunan desa.

3. *Job knowledge* (pengetahuan kerja), Dilihat dari pengetahuan kerja kepala desa sudah baik dimata masyarakat karena kepala desa mampu merealisasikan kebijakan pembangunan sesuai dengan yang sangat dibutuhkan masyarakat.
4. *Cooperation* (kerja Sama), Penilaian masyarakat terkait cara kerja kepala desa dalam pelaksanaan pembangunan sebagian besar informan menjawab sangat baik, karena kepala desa mampu menjalin kerja sama yang baik, lewat mendorong menggerakkan masyarakat untuk berperan aktif dalam pelaksanaan pembangunan.

Menurut Wilson dan Heyyel (1987:10) mengatakan bahwa *Quantity of work* (kuantitas kerja) adalah jumlah kerja yang dilaksanakan oleh seorang pegawai dalam suatu periode tertentu. Hal ini dapat dilihat dari hasil kerja pegawai dalam kerja penggunaan waktu tertentu dan kecepatan dalam menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya. Ketepatan yang dimaksud disini adalah ketepatan dalam melaksanakan pekerjaan, artinya adanya kesesuaian antara rencana kerja dengan sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa kuantitas kerja kepala desa sudah baik akan tetapi dalam ketepatan waktu penyelesaiannya pelaksanaan pembangunan tidak tepat pada waktunya atau bisa dikatakan lambat dikarenakan kurangnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan tersebut.

Kualitas pekerjaan menyangkut mutu yang dihasilkan yaitu seseorang dituntut untuk mengutamakan kualitas dalam pelaksanaan tugasnya. Menurut Hasibuan (2007:87) kualitas kerja adalah suatu standar fisik yang diukur dengan hasil kerja yang dilakukan atau dilaksanakan pegawai atas tugas-tugasnya. Sedangkan menurut Wilson dan Heyyel (1987:101) mengatakan bahwa *Quality of work* (kualitas kerja) menunjukkan sejauh mana mutu seorang pegawai dalam melaksanakan tugas-tugasnya meliputi ketepatan, kelengkapan, dan kerapian. Dari pendapat diatas, jelas bahwa kualitas kerja dapat diukur melalui ketepatan, kelengkapan, dan kerapian. Yang dimaksud ketepatan adalah ketepatan dalam melaksanakan tugas dan pekerjaannya. Artinya terdapat kesesuaian antara rencana kegiatan dengan sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Yang dimaksud dengan kelengkapan adalah kelengkapan ketelitian dalam melaksanakan tugasnya

dan yang dimaksud dengan kerapian adalah kerapian dalam melaksanakan tugas dan pekerjaannya. Berdasarkan dari penjelasan dan hasil wawancara diatas kepala Desa dinilai telah memiliki kualitas pekerjaan yang cukup baik.

Pemerintah desa diharapkan dapat meningkatkan wawasan dan pengetahuan kerja sehingga penyelenggaraan pemerintah desa dapat dilakukan dengan baik. Karena pemerintah desa berhubungan langsung dengan masyarakat serta sebagai ujung tombok dalam pembangunan, untuk itu pemerintah desa harus memiliki kemampuan sehingga dapat melaksanakan pembangunan sesuai dengan kebutuhan masyarakat sehingga pelaksanaannya tidak mendapat masalah. Kemampuan yang dimiliki oleh pemerintah desa akan dapat mengantisipasi dan menterjemahkan berbagai program pembangunan sesuai dengan tuntutan serta kebutuhan masyarakat.

Menurut Gomes (1994:104) kemampuan menunjukkan potensi orang untuk melaksanakan tugas atau pekerjaan. Berdasarkan uraian diatas bahwa apabila ingin mencapai hasil yang maksimal seorang pegawai harus bekerja dengan sungguh-sungguh beserta segenap kemampuan yang dimiliki di tunjang oleh sarana dan prasarana yang ada. Jika seorang pegawai bekerja dengan setengah hati maka pekerjaan yang dihasilkan tidaklah semaksimal yang diharapkan. Dilihat dari penjelasan dan hasil wawancara bahwa pengetahuan kepala desa sudah sangat baik dimata masyarakat karena kepala desa mampu merealisasikan kebijakan pembangunan sesuai dengan yang sangat dibutuhkan masyarakat.

Kerja sama merupakan bentuk dari interaksi sosial yang bersifat asosiatif yaitu hal dilakukan dengan dua orang atau lebih dimana mereka memiliki pandangan yang sama untuk mencapai tujuan tertentu. Kerja sama juga akan timbul jika seseorang atau kelompok orang sadar jika mereka memiliki kepentingan yang sama dan pada saat yang sama pula karna bagi mereka yang bekerja sama akan memiliki pengetahuan dan kesadaran untuk memenuhi segala kepentingannya. Kerja sama memiliki banyak manfaat yang bisa didapatkan oleh kedua belah pihak yang melakukan kerja sama.

Menurut Kusnadi (2006) kerja sama yaitu dapat mendorong adanya persingan yang bisa mencapai tujuannya yaitu meningkatkan produktifitas. Selain itu dengan bekerja sama meningkatkan semangat kerja individu sehingga tenaga kerja akan lebih efektif. Kerja sama juga dapat memberikan dorongan hubungan antara dua pihak menjadi lebih erat dan harmonis dan penuh kesetiakwaan, semangat yang tinggi bisa muncul karena adanya kerja sama. Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa kepala desa sangat baik dalam menjalankan tugas kerjanya dapat dilihat dari setiap adanya proses pelaksanaan kerja, kepala desa selalu berusaha menggerakkan masyarakat untuk bekerja sama melaksanakan proses pelaksanaan pembangunan desa.

Pada hasil Rangkuman Penelitian dengan Pembahasan Menggunakan Empat Indikator kinerja Menurut Gomes (2003:134) yaitu : 1. Quantity of work (kuantitas Kerja), Berdasarkan hasil penelitian bahwa kuantitas kerja kepala desa sudah baik akan tetapi dalam ketepatan waktu penyelesaiannya pelaksanaan pembangunan tidak tepat pada waktunya atau bisa dikatakan lambat dikarenakan kurangnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan tersebut. 2. Quality of work (kualitas kerja), kualitas kerja dapat diukur melalui ketepatan, kelengkapan, dan kerapian. Yang dimaksud ketepatan adalah ketepatan dalam melaksanakan tugas dan pekerjaannya. Artinya terdapat kesesuaian antara rencana kegiatan dengan sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Yang dimaksud dengan kelengkapan adalah kelengkapan ketelitian dalam melaksanakan tugasnya dan yang dimaksud dengan kerapian adalah kerapian dalam melaksanakan tugas dan pekerjaannya. Berdasarkan dari penjas dan hasil wawancara diatas kepala Desa dinilai telah memiliki kualitas pekerjaan yang cukup baik. 3. Job knowledge (pengetahuan Kerja), pengetahuan keja kepala desa sudah sangat baik dimata masyarakat karena kepala desa mampu merealisasikan kebijakan pembangunan sesuai dengan yang sangat dibutuhkan masyarakat. 4. Cooperation (kerja Sama), kepala desa sangat baik dalam menjalankan tugas kerjanya dapat dilihat dari setiap adanya proses pelaksanaan kerja, kepala desa selalu berusaha menggerakkan masyarakat untuk bekerja sama melaksanakan proses pelaksanaan pembangunan desa.

PENUTUP

Berdasarkan rangkuman hasil penelitian dan pembahasan, sebagaimana telah dilakukan sebelumnya, maka dapat disimpulkan penelitian ini sebagai berikut:

1. Quantity of work (kuantitas kerja), Kuantitas Kerja kepala desa sudah baik akan tetapi dalam ketepatan waktu penyelesaian pelaksanaan pembangunan tidak tepat pada waktunya atau bisa dikatakan lambat dikarenakan kurangnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan.
2. Quality of work (kualitas pekerjaan) kualitas pekerjaan kepala desa dalam pelaksanaan pembangunan di desa sudah cukup baik.
3. Job knowledge (pengetahuan Kerja). Pengetahuan kerja Kepala desa dalam pelaksanaan pembangunan, kepala desa mampu merealisasikan kebijakan pembangunan sesuai dengan yang sangat dibutuhkan masyarakat.
4. Cooperation (kerja sama), kepala desa mampu menjalin kerja sama yang baik, lewat mendorong menggerakkan masyarakat untuk berperan aktif dalam pelaksanaan pembangunan.

Dalam upaya perbaikan kinerja kepala desa maka disarankan agar program-program pelaksanaan pembangunan berjalan secara efisien dan efektif kinerja kepala desa harus ditingkatkan lebih baik lagi, mengajak masyarakat berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan pembangunan desa. Kepala desa beserta aparat desa dapat menggali dan memahami kebutuhan masyarakat yang dirasakan mendesak dalam perencanaan pembangunan.

DAFTAR PUSTAKA

- Gomes . F . C 2003 . Manajemen sumber daya manusia. Yogyakarta : Andi offset.
- Hasibuan. 2007. Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta : PT. Bumi Aksara
- Kusnadi. 2006. Perempuan Pesisir. Yogyakarta: PT LKiS Pelangi Aksara.
- Mangkunegara, A.P. 2002. Manajemen Sumber Daya. PT Bandung: Remaja Rosdakarya.

- Maulana. E. 2012. Kepemimpinan Transformasional Dalam Birokrasi Pemerintah. Jakarta: PT Multicerdas.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Simanjutak P.J. 2005. Manajemen dan Evaluasi Kerja. Jakarta Penerbit FEUI
- Suparno. A. S. 2001. Membangun Kompetensi Dasar. Jakarta: Direktorat. Jendral Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan.
- Widodo. J. 2006. Membangun birokrasi berbasis kinerja. Jakarta : Bayumedia Publishing.
- Winardi. 2001. Manajemen perilaku organisasi. Surabaya Erlangga.
- Willson and Heyyel. 1987. Hand Book Of Modern Office Management and Administration Service. New Jersey : Mc Graw Hill Inc.